

NASKAH FINAL  
13 November 2011  
Pukul 14.00 WIB.



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2011-2012**

**SENIN, 14 NOVEMBER 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2011**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2011-2012**

**SENIN, 14 NOVEMBER 2011**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***  
**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati,**

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Pada hari ini, Dewan akan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2011-2012 yang dimulai pada hari ini, 14 November dan akan ditutup pada 16 Desember 2011. Masa Sidang ini akan berjalan selama 25 hari kerja. Dalam jangka waktu kurang dari sebulan, Dewan berusaha menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, penetapan anggaran, pengawasan, dan fungsi lainnya, yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan, yaitu penetapan dan pencalonan para pejabat publik.

Penetapan pejabat-pejabat publik yang akan dilaksanakan dalam Masa Sidang II adalah penetapan calon Pimpinan KPK, pencalonan anggota BPK, pencalonan 2 (dua) Deputi Gubernur BI, pencalonan Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2011-2015, pencalonan anggota Dewan Pengawas LPP-TVRI 2011-2015, dan pencalonan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Amandemen pertama UUD 1945 Pasal 20 mengamanatkan, bahwa *DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang*. Itulah sebabnya, Pimpinan Dewan senantiasa mendorong agar pelaksanaan fungsi legislasi tetap menjadi fokus utama, walaupun fungsi anggaran dan pengawasan juga harus tetap berjalan.

Berkaitan dengan fungsi legislasi, saat ini Dewan akan menyelesaikan 13 (tigabelas) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, baik RUU inisiatif DPR maupun RUU dari Pemerintah. Pembahasan RUU yang akan dilanjutkan, antara lain adalah RUU Perubahan Atas UU No. 25 Tahun

1992 tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Keamanan Nasional, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Aparatur Sipil Negara, dan RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sepanjang tahun 2011 sampai dengan akhir Masa Sidang I pada tanggal 28 Oktober 2011, Dewan telah menyelesaikan 18 (delapan belas) RUU Prioritas dan 4 (empat) RUU Kumulatif Terbuka. Pimpinan Dewan berharap, dalam Masa Sidang II yang hanya berjalan kurang dari 1 (satu) bulan, setidaknya ada 5-6 RUU dapat memasuki Pembicaraan Tingkat II. Untuk itu, Dewan menghimbau Komisi-Komisi, Badan Legislasi (Baleg), dan Panitia Khusus, untuk bekerja keras menuntaskan berbagai RUU tersebut. Komisi-Komisi ataupun Baleg yang telah mengajukan berbagai RUU inisiatif yang diusulkan masuk Program Legislasi Nasional maupun dalam prioritas tahunan, agar konsekwen untuk menyelesaikan rumusan RUU dan menyiapkan naskah akademik, dengan didukung oleh para tenaga ahli perundang-undangan dan masukan dari para pakar dan masyarakat. Tahun 2012 adalah tahun yang paling ideal bagi DPR untuk memacu pelaksanaan

fungsi legislasi. Momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh DPR guna memenuhi amanat Pasal 20 UUD 1945. Dewan khawatir, pada pertengahan tahun 2013, situasi politik sudah kurang kondusif, karena persiapan menghadapi Pemilu 2014, dan hal ini sudah tentu akan berpengaruh pada kinerja Dewan.

Dewan sangat menyadari bahwa penyelesaian berbagai RUU masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian kita patut bersyukur, menjelang penutupan Masa Sidang I, 4 (empat) RUU yang amat berarti bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional, telah dapat diselesaikan. Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Disetujuinya RUU tentang Pengelolaan Zakat yang semula berjudul RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS), memiliki arti penting dalam program pengentasan kemiskinan, mengingat sudah 66 tahun merdeka, RUU tentang Pengelolaan Zakat belum juga diundangkan. Undang-Undang ini merupakan sistem hukum

positif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, dimana negara memiliki peran dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan jaminan kepada seluruh fakir miskin yang menjadi mustahik utama zakat.

RUU tentang BPJS juga telah disetujui untuk disahkan menjadi UU menjelang akhir Penutupan Masa Sidang I 2011-2012. Pembahasan atas RUU ini benar-benar menguras energi anggota Pansus maupun Pemerintah, dan telah mengundang perhatian masyarakat, khususnya kalangan pekerja maupun buruh. Bahkan, RUU ini adalah satu-satunya RUU dimana Pimpinan Dewan terlibat langsung dalam melakukan pendekatan dan mencari solusi bagi penyelesaian substansi krusial. Waktu pembahasan RUU ini kurang lebih 1 (satu) tahun 28 (duapuluh delapan) hari, dan melibatkan 8 (delapan) menteri yang ditunjuk Presiden dibawah koordinator Menteri Keuangan. Kesepahaman yang sulit ditemukan antara DPR dan Pemerintah adalah mengenai transformasi BPJS-2 (BPJS Ketenagakerjaan), dan awal mulai beroperasinya. Sebagai penginisiatif RUU, DPR berketetapan untuk melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

*Alhamdulillah*, akhirnya didapat kata sepakat menjelang batas akhir pembahasan.

Disetujuinya RUU tentang BPJS, jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara efektif, efisien, dan terarah, sesuai dengan standar kompetensi dan profesionalisme, sehingga mampu memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan manfaat jaminan sosial sebesar-besarnya bagi terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat secara layak.

RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga memerlukan pembahasan dalam waktu yang cukup lama. Pembicaraan Tingkat I atas RUU ini telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, yaitu sejak 18 Agustus 2010 sampai 25 Oktober 2011 dalam 5 (lima) masa sidang melalui 3 (tiga) kali perpanjangan waktu. Dalam RUU ini disepakati bahwa OJK adalah lembaga independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campurtangan pihak lain. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Pengasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan

lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan yang sesuai dengan amanat UU tentang OJK. OJK juga harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam mengawasi kegiatan di sektor perbankan, dan dapat melakukan kerjasama dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi/lembaga internasional lainnya. Untuk itu, OJK dibenarkan untuk membentuk forum koordinasi stabilitas sistem keuangan.

Berkaitan dengan akan segera diundangkannya RUU tentang OJK, Dewan mengingatkan Pemerintah agar pembentukan institusi dan transformasi pegawai yang akan dilakukan, ditangani dengan sebaik-baiknya, supaya pengalihan kewenangan dan tugas pengawasan yang selama ini dipegang oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta tugas Bank Indonesia untuk sektor pengawasan perbankan, tidak menimbulkan masalah.

## **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Masih berkaitan dengan perundang-undangan, di satu sisi, Dewan senantiasa mendapatkan kritik masyarakat karena rendahnya produk UU yang dihasilkan, lebih-lebih bila dikaitkan dengan prioritas tahunan Prolegnas. Namun, disisi lain, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa UU yang sudah selesai dibahas dan diundangkan, ternyata beberapa waktu kemudian dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Yang terbaru adalah uji materi atas UU No. 11 tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi pada Pasal 45A dan Pasal 57 ayat 2A.

Terhadap Pasal 45A tentang larangan *ultra petita* bagi Mahkamah Konstitusi (larangan memutus melebihi apa yang dimohonkan), Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan pemohon. Artinya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal ini dengan beberapa argumentasi. Terhadap pasal 57 ayat 2A tentang komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK juga telah membatalkannya dengan argumentasi bahwa komposisi Majelis Kehormatan MK berpotensi mengancam kemandirian MK.

Melihat hal ini, kita seringkali bertanya-tanya demikian seringnya UU di-ujimaterikan di MK dan sedemikian sering putusan MK membatalkan pasal-pasal, yang pada saat Pembahasan Tingkat I di DPR memerlukan diskusi dan dialog yang cukup lama. DPR tidak dapat menghalangi uji materi yang diajukan masyarakat, karena hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kedepan, Pimpinan Dewan mengharapkan substansi materi RUU yang akan dihasilkan harus dijaga agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Baru saja DPR dan Pemerintah menyelesaikan Pembahasan RUU APBN 2012. Pembahasan diselesaikan tepat waktu, yaitu 2 (dua) bulan sebelum APBN 2012 diberlakukan, sebagaimana perintah UU. RUU ini telah menyepakati beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga SPN 3 (tiga) bulan, harga dan *lifting* minyak.

RAPBN yang dibahas bersama DPR setiap tahun disusun berdasarkan asumsi makro ekonomi menurut pertimbangan eksternal perekonomian dunia serta

didasarkan pada kondisi dan permasalahan nasional dan daerah yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan APBN adalah kemampuan Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, dan merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Dalam RAPBN 2012, pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan 6,7% harus diupayakan tercapai. Tahun ini Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 6,5% ditengah krisis perekonomian global. Angka pertumbuhan ini terus bergerak dan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Dewan sependapat dengan Pemerintah agar belanja modal dilakukan dengan benar, investasi terus digalakkan, target ekspor dipertahankan, dan sektor riil harus bergerak dengan baik.

Terhadap berbagai asumsi dasar RAPBN 2012 sebagaimana yang diputuskan, Badan Anggaran memberikan beberapa catatan, diantaranya, Pemerintah harus menjaga pertumbuhan ekonomi selama menghadapi gejala ekonomi global melalui penyerapan anggaran dan menyederhanakan proses birokrasi. Target yang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 6,7% adalah

penurunan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja melalui penyediaan lapangan kerja, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Terkait *lifting* minyak, kalangan Dewan memberikan catatan agar Pemerintah dan DPR mempercepat revisi UU tentang Migas, Pemerintah diminta mempersiapkan arah kebijakan untuk penggunaan energi alternatif di masa datang seperti gas dan batubara, dan membuat skema yang mendorong penemuan sumber-sumber minyak baru.

Dalam pelaksanaan APBN, Dewan meminta Pemerintah memperhatikan kelompok miskin dengan indikator dan kategori yang jelas. Di sisi penerimaan, Pemerintah agar membenahi sektor hulu secara progresif dan bekerja keras dengan mempercepat produksi dalam negeri, penerimaan sektor pajak ditetapkan *tax ratio* lebih tinggi, dengan memberantas mafia perpajakan serta memaksimalkan pengawasan penerimaan perpajakan.

Dalam optimalisasi pelaksanaan APBN 2012, Dewan meminta kepada para menteri baru di bidang ekonomi hasil *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini, agar siap menghadapi berbagai persoalan berat. Kita ketahui bahwa dari sisi eksternal, tekanan ketidakpastian

perekonomian dunia masih akan terus mempengaruhi. Pada sisi internal, sektor riil harus dapat dipacu. Kepiawaian para menteri di bidang ekonomi akan sangat menentukan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. Dewan sangat memiliki harapan besar agar para menteri mengutamakan profesionalitas, kompetensi dan mempunyai komitmen yang kuat sebagai faktor pendukung dalam menghadapi tantangan global.

Untuk itu Dewan meminta agar para menteri, selain fokus pada bidang kerjanya secara profesional mengatasi persoalan-persoalan teknis, dibutuhkan koordinasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ekonomi yang berkembang, mulai dari soal impor beras, garam, kentang, atau tidak tercapainya target elektrifikasi *lifting* minyak.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam RAPBN 2012 adalah alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp. 289,9 triliun atau 20,2% dari total belanja negara. Kebijakan anggaran pendidikan tahun 2012 diarahkan untuk mendukung antara lain: peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah;

peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; dan peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan. Mengingat besarnya dana untuk sektor pendidikan tersebut, perlu perhatian khusus bagi lembaga-lembaga pelaksana agar penggunaan anggaran dapat akuntabel dan dipertanggungjawabkan secara baik.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, telah menyita perhatian kita. Sebulan terakhir ini, berbagai permasalahan di wilayah Papua kembali menjadi sorotan. Paling tidak, tercatat tiga masalah di Papua yaitu isu separatisme, kesenjangan sosial ekonomi dan rasa ketidakadilan, serta konflik antara karyawan dan manajemen PT. Freeport Indonesia. Kongres Papua III pada pertengahan Oktober 2011 berakhir ricuh dan memakan korban jiwa. Teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata juga telah menewaskan Kapolsek Mulia Puncak Jaya.

Akar permasalahan konflik yang ada di Papua sebenarnya adalah rasa ketidakadilan dan belum meratanya

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat Papua, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Masyarakat Papua ingin dihargai sebagai manusia yang bermartabat, untuk itulah perlu dilakukan dialog secara konstruktif dalam menciptakan kedamaian di bumi Papua.

Semua permasalahan ini memerlukan penanganan serius, tidak hanya pernyataan keprihatinan saja, tetapi harus dibarengi dengan langkah-langkah kongkret dari Pemerintah.

Pemerintah baru-baru ini, telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) melalui Perpres No. 65 tahun 2011. Unit ini harus diberikan kesempatan untuk bekerja efektif, efisien, dan terutama melakukan komunikasi intensif dengan mengedepankan dialog untuk menemukan solusi.

Provinsi Papua dan Papua Barat sebenarnya telah mendapatkan status otonomi khusus berdasar UU No. 21 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2008. Pemberian otonomi khusus merupakan kebijakan politik yang tepat, merupakan langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. Dana otonomi khusus yang telah dikururkan mencapai Rp. 30

trilyun, tetapi masyarakat Papua tidak merasa ada peningkatan kesejahteraan, karena otonomi khusus tidak berjalan efektif dan amanat UU ini belum dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU otonomi khusus dan tata kelola otonomi khusus harus diperbaiki.

Oleh karena itu, Dewan meminta agar dilakukan langkah-langkah kongkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Pekerjaan rumah kita semua adalah, bagaimana mendorong kesadaran generasi muda Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bagaimana Papua merasa memiliki Indonesia.

Untuk penyelesaian masalah PT. Freeport Indonesia, kita meminta kepada manajemen agar memperhatikan tuntutan karyawan. Mereka merasa kurang mendapatkan keadilan akibat ketidakseimbangan kontrak karya yang ada. Manajemen harus melakukan dialog dengan karyawan untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan sisi kesejahteraan, keadilan, dan kemanusiaan. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi dan memediasi supaya permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Tindak pidana korupsi dan terorisme telah mencederai perasaan rakyat. Oleh karena itu, pemberian pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme, sangat mengecewakan rakyat. Sehubungan dengan hal itu, Dewan memahami rencana Pemerintah untuk melakukan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme. Namun, perlu kiranya moratorium tersebut dikaji secara komprehensif agar tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kajian tersebut perlu dilakukan, mengingat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak bagi semua narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Wacana yang berkaitan dengan putusan hakim pengadilan Tipikor di daerah, telah mengundang polemik di masyarakat. Bahkan, ada wacana untuk dilakukan pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah. Kami menyarankan agar permasalahan ini secepatnya dilakukan

evaluasi dalam forum sarasehan ataupun forum sejenis lainnya antar lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang dianggap penting. Evaluasi ini perlu, untuk menemukan satu kesepakatan tentang penerapan hukum dalam peradilan Tipikor.

### **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Permasalahan birokrasi juga tidak luput dari perhatian Dewan. Birokrasi Indonesia selalu identik dengan patologinya yang berbelit-belit dan struktur hirarki yang luas, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efisien dan efektif dalam melayani masyarakat. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam sumber daya manusia (SDM), tata laksana, dan kelembagaan.

Terkait dengan kelembagaan, banyaknya Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibangun Pemerintah telah menambah daftar panjang struktur birokrasi di Indonesia. Keberadaan LNS di Indonesia dianggap tidak berbanding lurus dengan tugas dan fungsi dari LNS itu sendiri. Adapun LNS-LNS tersebut dibentuk dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan, dimana ada beberapa LNS

yang tugas dan fungsinya dianggap sama dengan lembaga struktural formal yang sudah ada. Oleh karena itu, Dewan berharap ada evaluasi terhadap keberadaan LNS-LNS tersebut, agar struktur birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, sehingga mampu menciptakan *good governance*.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Saat ini, Pemerintah sedang melaksanakan penyelesaian E-KTP untuk penduduk Indonesia. Data kependudukan tidak hanya penting bagi penyelenggaraan Pemilu 2014, tetapi lebih dari itu, KTP merupakan identitas diri yang jelas dan tercatat dalam dokumen negara. Oleh karena itu, semua masyarakat harus memberikan dukungan agar program nasional ini dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dengan data-data yang benar-benar valid.

Proses ibadah haji 2012 baru saja berakhir, namun ribuan jemaah haji Indonesia masih berada di Arab Saudi menunggu kepulangan sesuai Kloter yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan haji tahun ini, DPR telah membentuk 2 (dua) tim, yaitu Tim Pertama yang melakukan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan haji, dan Tim Kedua

yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI.

Banyak permasalahan yang ditemukan, baik oleh Tim Pertama maupun Tim Kedua, khususnya berkaitan dengan akomodasi, sarana dan prasarana, transportasi, makan bagi jamaah, dan pelayanan kesehatan. Permasalahan tersebut adalah permasalahan klasik yang selalu berulang setiap tahunnya, walaupun Dewan tidak menafikkan adanya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Pengelolaan haji bukan hanya masalah peribadatan pelaksanaan Rukun Islam ke-5 bagi umat Islam, tetapi lebih banyak terkait dengan manajemen dengan tujuan bagaimana para jamaah dapat melaksanakan semua ritual haji dengan nyaman, tenang, dan mendapatkan semua hak-haknya selama berada di tanah suci. Tentunya, semua temuan tersebut merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah dan Dewan untuk dicarikan solusi, agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali di masa-masa yang akan datang.

Selain masalah haji, kita menyambut dengan baik langkah Pemerintah memfasilitasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang telah habis izin tinggalnya di Arab

Saudi dengan pesawat haji. Pemulangan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam upaya memartabatkan setiap warga negaranya. Berdasarkan moratorium, TKI yang ikut dalam program pemulangan seperti ini dipastikan tidak dapat kembali bekerja sebagai TKI ke Arab Saudi untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Dewan berpendapat, regulasi yang terkait dengan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri harus diatur secara menyeluruh mulai dari proses seleksi, penempatan, sampai perlindungan selama di luar negeri dan pemulangan. Pemulangan pun tidak hanya sampai di bandara yang menjadi tempat masuk pertama, tetapi dengan selamat sampai ke daerah asal atau kampung halaman. Tanggung jawab tersebut cukup kompleks, terutama karena setelah kembali ke kampung halaman, Pemerintah juga mempunyai program memberikan jaminan pelatihan wirausaha, agar para TKI segera mendapatkan pekerjaan baru atau paling tidak dapat membuka usaha baru. Tingkat kompleksitas dalam penanganan TKI menyebabkan koordinasi lintas Kementerian dan instansi terkait, menjadi suatu keharusan. Keberadaan UU tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri perlu didukung dengan ratifikasi konvensi

perlindungan pekerja migran dan keluarganya, sehingga permasalahan perlindungan TKI di masa yang akan datang dapat diminimalisir.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Sejak 11 November yang lalu hingga 22 November yang akan datang, Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara ke-26. Seperti direncanakan, Upacara Pembukaan SEA Games 2011 telah dilaksanakan di Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan. Pertandingan-pertandingan olahraga, selain di Palembang, juga dilaksanakan di Jakarta.

Indonesia pernah berjaya pada SEA Games tahun 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, dan 1993. Terakhir Indonesia menjadi juara umum pada 1997, saat itu Indonesia menjadi tuan rumah. Berkaitan dengan hal tersebut, kami ucapkan selamat berjuang kepada putra-putri Indonesia yang berlaga mewakili Indonesia dalam ajang SEA GAMES ke-26 tahun 2011. Kita semua terus memberikan dukungan agar kontingen Indonesia dapat kembali menjadi juara umum pada SEA Games tahun ini.

## **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Kalau tadi saya banyak menguraikan perihal pelaksanaan tugas-tugas Dewan dan menyoroti permasalahan yang muncul akhir-akhir ini, perhatian kita juga tertuju pada *international event*, khususnya penyelenggaraan KTT ASEAN ke-19 di Bali pada tanggal 17-19 November 2011. Pada KTT ASEAN ke-19, akan ditandatangani 5 (lima) kerjasama baru dan disiapkan ASEAN *roadmap* menuju era *millenium development goals*, serta kesepakatan negara-negara anggota dan menyikapi isu-isu perubahan iklim.

Dengan mengusung tema "*ASEAN Community in a Global Community of Nations*", Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2011, akan berupaya untuk memimpin ASEAN menuju masa depan yang lebih baik. Kehadiran Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Amerika Serikat serta Rusia sebagai anggota baru KTT Asia Timur menjadi penting dan menarik, tidak saja bagi Indonesia tapi juga bagi mata dunia. Pertemuan para Kepala Negara merupakan terobosan diplomatik untuk dapat menghasilkan kemajuan baru bagi kehidupan yang lebih baik. Fokus sekaligus target melalui kemajuan pencapaian menuju komunitas ASEAN

2015, upaya memastikan kawasan ASEAN menjadi wilayah aman dan kondusif, serta keinginan Indonesia untuk memberikan target baru ASEAN pasca tahun 2015, diharapkan dapat tercapai melalui KTT ini. Kemajuan baru ini juga akan mengesahkan lahirnya Bali Concord III yang berupa rencana sasaran bersama ASEAN dengan melewati terwujudnya Komunitas ASEAN 2015 menuju peran global 2022. Deklarasi Bali Concord III akan menjadi pijakan bagi pengaturan hubungan di tingkat regional ASEAN ke arah tuntunan kerjasama antar kawasan ditengah komunitas antar bangsa.

Pada masa-masa terakhir sebagai Ketua ASEAN 2011 dan empat tahun menjelang terwujudnya Komunitas ASEAN 2015, Dewan berharap bahwa Indonesia tidak hanya menggagas tapi memastikan langkah bahwa fondasi yang terbangun dapat menegakkan kondisi politik, keamanan, sosial budaya, serta dapat bergerak maju mengimbangi dinamika tuntutan lain yang bergerak cepat ditengah arus globalisasi.

Kawasan ASEAN masih menyisakan permasalahan politik, yaitu Myanmar. Sebagai negara satu kawasan, Indonesia menyambut baik tanda-tanda reformasi politik di

Myanmar. Hal tersebut terkait dukungan pemerintah terhadap upaya Myanmar untuk menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2014. Upaya ini dapat terwujud jika ada langkah lebih lanjut menuju reformasi demokrasi di negara yang didominasi militer tersebut. Dewan berpendapat bahwa pembebasan tahanan politik yang telah dilakukan Pemerintah Myanmar sebagai pertanda baik atas reformasi politik yang telah dijanjikan negara tersebut.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Berkaitan dengan pertemuan yang berskala internasional, DPR-RI pun, dua bulan ke depan akan menjadi tuan rumah *The 7th Session of The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Related Meetings*, di Palembang. PUIC didirikan demi membina koordinasi antara bangsa-bangsa di dunia dalam rangka untuk menghormati dan membela hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian berdasarkan keadilan. Sebagaimana diketahui, Ketua DPR-RI telah terpilih sebagai Presiden *Parliamentary Union of OIC Member States* (PUIC) untuk periode 2012-2014. Dalam posisi ini, tentu saja banyak sekali tantangan yang

dihadapi untuk mewujudkan harapan PUIC sebagai lembaga yang kredibel dalam menyuarakan kepentingan negara-negara anggota OIC.

Berkaitan dengan penyelenggaraan *The 7th Session of The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference and Related Meetings*, di Palembang, dukungan dari para anggota Dewan amat kami harapkan demi suksesnya penyelenggaraan, baik dari segi substansi maupun teknis. Partisipasi para anggota yang akan tergabung dalam Delegasi DPR-RI sangat kita harapkan.

Dalam pada itu, telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia mendukung suksesnya Palestina menjadi anggota UNESCO yang merupakan organisasi PBB untuk pendidikan, ilmu dan budaya. Dengan realisasi ini, Indonesia telah menunjukkan tidak hanya memberikan dukungan bagi Palestina, namun juga menjadi inisiator bagi status Palestina di PBB dan juga UNESCO. Keanggotaan Palestina di UNESCO menjadi peluang terbukanya keanggotaan di organisasi PBB lainnya. Keragaman dalam budaya bernegara dan bergabungnya Palestina di UNESCO, membuktikan bahwa kita sebagai warga dunia dapat saling mendengar dan memahami. Dewan berpendapat Indonesia

sebagai negara yang besar tentu saja mendukung proses perdamaian, sehingga keadaan ini bisa dibuat selaras dan bukan pilihan yang saling bertentangan.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Pergantian musim penghujan di Indonesia telah dimulai pada 2 (dua) minggu terakhir ini. Analisa curah hujan lima tahunan memperlihatkan bahwa peningkatan frekuensi curah hujan akan terjadi kembali tahun depan, diperkirakan pada bulan Januari-Februari 2012. Bulan-bulan tersebut merupakan puncak musim hujan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi bencana banjir di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jakarta dan sekitarnya.

Pemerintah dan masyarakat perlu mewaspadaai siklus pancaroba yang dapat mendatangkan kerugian besar, dengan segera membuat berbagai antisipasi agar bencana tidak terulang. Untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya, setiap terjadi hujan, pasti diikuti dengan banjir. Dewan berharap, Pemerintah Provinsi Jakarta pada khususnya dan Pemerintah Kota/Kabupaten sekitar Jakarta, melakukan upaya untuk menanganinya.

Dewan menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat seperti pembersihan dan pembangunan pondasi di bantaran Kali Ciliwung, simulasi banjir bersama pihak kelurahan. Kesiapan sarana dan prasarana perlu, guna membantu korban banjir di tempat yang nantinya menjadi tempat pengungsian bencana banjir, pembangunan tanggul dan rumah pompa, serta pendirian posko-posko banjir. Jika saat ini banjir kanal barat dan timur sudah hampir terselesaikan, maka perlu segera dilakukan revitalisasi 13 sungai termasuk sungai Ciliwung yang mengalir kota Jakarta secara bertahap, serta revitalisasi situ-situ guna mempersiapkan Jakarta dalam menghadapi banjir. Selain itu, pengaturan tata ruang dalam UU tentang Penataan Ruang perlu direvitalisasi dengan segera mengupayakan minimal 30% dari wilayah Jakarta sebagai kawasan terbuka hijau.

Jakarta adalah ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, Jakarta harus aman dari banjir. Sebab, musibah banjir akan berdampak kepada terganggunya aktifitas kegiatan pemerintahan dan kegiatan perekonomian masyarakat.

Demikianlah, Pidato Pembukaan Masa Persidangan II tahun Sidang 2011-2012 pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selamat menjalankan tugas dalam masa Sidang II.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

KETOK 3 X

Jakarta, 14 November 2011

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**DR. H. MARZUKI ALIE**